



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
SUB UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI SUTARTINI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 429567

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.071.000.000

1. Tanah Seluas 160 m2 di KUDUS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 70.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/160 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 702 m2 di SRAGEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 351.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 188.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5 S AT 9CKD0 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT CBS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.500.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 71.761.904**F. HARTA LAINNYA** Rp. 69.815.000**Sub Total** Rp. 1.433.576.904**III. HUTANG** Rp. 70.800.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.362.776.904

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.